



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDY
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 449497

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.390.000.000**

1. Tanah Seluas 1098 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 357 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/80 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 539 m2/500 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 420.000.000
6. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **379.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **74.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	107.169.675
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.950.669.675
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.950.669.675

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.